

# LAPORAN BP3OKP

JULI 2025





## **Ringkasan Eksekutif**

Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Provinsi Papua telah menjalankan berbagai kegiatan strategis yang terfokus pada empat bidang utama, yaitu pendidikan, kesehatan, produktivitas ekonomi, dan stabilitas keamanan. Melalui peran aktif anggota badan dan kelompok kerja khusus, BP3OKP bersinergi antara pemerintah daerah, kementerian/lembaga, serta pemangku kepentingan lain guna mempercepat pembangunan di Tanah Papua. Beberapa kegiatan penting meliputi konsolidasi pendidikan dasar dan menengah, pengawasan tenaga kesehatan, penguatan regulasi pendidikan, serta penyusunan program ekonomi berbasis adat yang melibatkan berbagai pihak.

Selanjutnya, upaya percepatan pembangunan juga ditunjang dengan penguatan koordinasi antar lembaga dan mitra strategis seperti Kejaksaan Tinggi serta pihak keamanan dalam rangka menjaga stabilitas menjelang pemungutan suara ulang Gubernur Papua. Kelompok kerja BP3OKP berperan penting dalam mengawasi pelayanan kesehatan, mendukung pengembangan ekonomi lokal, serta memastikan keamanan dan kelancaran proses demokrasi. Program-program yang bersifat terintegrasi ini bertujuan mengatasi kendala utama pembangunan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Papua secara menyeluruh.

Rekomendasi yang diajukan menekankan pentingnya memperkuat sinergi lintas sektor, menambah sumber daya manusia dan fasilitas kesehatan, memperkuat regulasi pendidikan, serta melibatkan tokoh adat dan agama dalam menjaga keamanan dan mendukung pembangunan. Dengan langkah-langkah strategis dan sinergi yang terjalin, diharapkan pembangunan Otonomi Khusus di Papua dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan, sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan menjaga stabilitas wilayah secara kokoh.



**ALBERTH YOKU, S.Ag**  
**Anggota BPP RI Provinsi Papua**



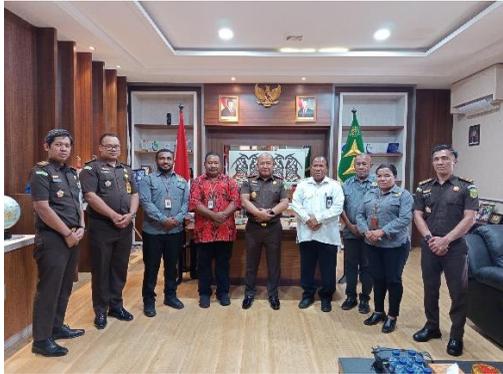
## 1. Kegiatan Strategis

Anggota Badan dan Kelompok Kerja (Pokja) BP30KP telah melaksanakan kegiatan-kegiatan strategis sebagai berikut :

### a. Anggota Badan

No	Kegiatan Strategis	Waktu (Tanggal)	Tujuan	Hasil	Gambar (Muat 1 - 2 Gambar)
1	Konsolidasi Regional Pendidikan Dasar & Menengah Se Tanah Papua Tahun 2025	7-9 Juli 2025	Menjalankan Fungsi SHEK lewat menghadiri Undangan dan memberikan Pemaparan tentang BP30KP	Komitmen Bersama yang di tandatangi oleh Pemda diketahui oleh BP30KP terkait dekat percepatan Pembangunan Pendidikan di Papua	  



2	Pertemuan dengan Kejaksaan Tinggi Papua	31 Juli 2025	Menjalankan Fungsi SHEK dengan melakukan audiensi	KAJATI menyambut kehadiran BP3OKP dan siap berkoordinasi lebih lanjut.	 
---	---	--------------	---	--	---



**b. Kelompok Kerja (Pokja)**  
**I. Papua Sehat**

No	Kegiatan Strategis	Waktu	Tujuan	Hasil	Gambar
1	Pengawasan Rekrutmen dan Optimalisasi Kesiapan Pelayanan di RSUP Jayapura Provinsi Papua	7-11 Juli 2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendapatkan informasi yang berhubungan dengan Rencana Perkembangan Terkait Perekrutan RSUP Jayapura</li> <li>2. Mendapatkan informasi yang berhubungan dengan Rencana Kesiapan Pelayanan yang Optimal di RSUP Jayapura Provinsi Papua.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dengan pengaturan regulasi dan kerja sama yang baik, diharapkan dalam beberapa tahun ke depan, semakin banyak putra-putri Papua yang siap dan mampu berkontribusi dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Vertikal dan fasilitas kesehatan lainnya.</li> <li>- Kebutuhan awal diperkirakan sekitar 84 orang dari total 400 tenaga, yang akan direkrut secara bertahap seiring dengan mulai beroperasinya rumah sakit. Poltekkes diberikan kuota khusus sebanyak 84 orang untuk mengirimkan tenaga dengan kualitas terbaik guna memenuhi kebutuhan tersebut.</li> <li>- Dengan fokus pada perekrutan, pengembangan sistem, dan peningkatan kualitas pelayanan, rumah sakit dapat mencapai kesiapan yang optimal dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.</li> <li>- Rumah Sakit Vertikal hendaknya dijadikan teladan sekaligus inspirasi dalam</li> </ul>	



				<p>mengambil berbagai langkah strategis, agar generasi muda Papua dapat dipersiapkan secara matang untuk berkarier di institusi tersebut di masa mendatang. Melalui penguatan regulasi dan sinergi yang harmonis, diharapkan dalam beberapa tahun ke depan semakin banyak putra-putri Papua yang siap dan mampu memberikan kontribusi nyata dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Vertikal maupun fasilitas kesehatan lainnya.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Perbaiki sanitasi dan lingkungan. Dengan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan keluarga, stunting dapat dicegah dan diatasi untuk mewujudkan generasi penerus bangsa yang sehat dan berkualitas.</li></ul>	 
--	--	--	--	---	--



2	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perkuat Layanan Kesehatan Melalui Pemeriksaan Gratis di Papua</li><li>- Evaluasi Kesiapan Fasilitas Kesehatan di Kapal Perintis</li></ul>	24-25 Juli 2025	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mendapatkan Informasi Yang Berhubungan Dengan Pemeriksaan Kesehatan Gratis ( PKG).</li><li>• Mendapatkan informasi yang berhubungan dengan Kesiapan Fasilitas Kesehatan di Kapal Perintis.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) melalui Pokja Papua Sehat terus mendorong peningkatan layanan kesehatan dasar bagi masyarakat Papua, khususnya melalui Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG). Program ini menjadi bagian dari strategi percepatan pembangunan bidang kesehatan yang menasar langsung fasilitas puskesmas dan puskesmas pembantu.</li><li>• Dalam forum tersebut, BP3OKP menyoroti pentingnya transformasi kapal perintis menjadi fasilitas kesehatan terapung, seperti klinik atau puskesmas laut, yang dapat menjangkau wilayah-wilayah 3T (Terluar, Terdepan, Terpencil). Pasalnya, masyarakat pesisir dan kepulauan di Papua masih sulit mengakses layanan kesehatan dasar.</li></ul>	
---	---	-----------------	--	---	--



3	Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA) Papua Tahun 2025	30 Juli 2025	<ul style="list-style-type: none"><li>- Memberikan dukungan dana operasional Program Bangga Kencana dan Percepatan penurunan Stunting. Terlaksananya Program Bangga Kencana dan Percepatan penurunan Stunting di Provinsi, Kabupaten/Kota hingga ke lini lapangan.</li><li>- Melalui kegiatan ini Badan gizi nasional juga telah memaparkan Pedoman teknis distribusi makanan dan edukasi gizi pada program MBG pada ibu hamil, ibu menyusui, anak balita dan non-paud ke deputian system dan tata Kelola Februari 2025</li></ul>	Dalam forum tersebut BKKBN DAK BOKB memaparkan Efektivitas Pemanfaatan DAK BOKB yaitu Tinjauan Perspektif Pengawasan Intern Pemerintah, DAK Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Peraturan BKKBN NO. 4 TAHUN 2024 TTG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BOKB TA 2025) DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk melaksanakan kegiatan yang disesuaikan dengan kewenangan daerah dalam mendukung upaya pencapaian sasaran prioritas pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana serta penurunan stunting.	
---	--	--------------	---	---	---



II. Papua Cerdas

No	Kegiatan Strategis	Waktu	Tujuan	Hasil	Gambar
	Konsolidasi Regional Pendidikan Dasar & Menengah Se Tanah Papua Tahun 2025	7-9 Juli 2025	Menjalankan Fungsi SHEK dengan menghadiri Undangan dan mengikuti Diskusi Panel	Anggota Pokja terbagi kedalam beberapa Bidang Diskusi yang akan merumuskan rekomendasi kebijakan yang akan di implementasikan	

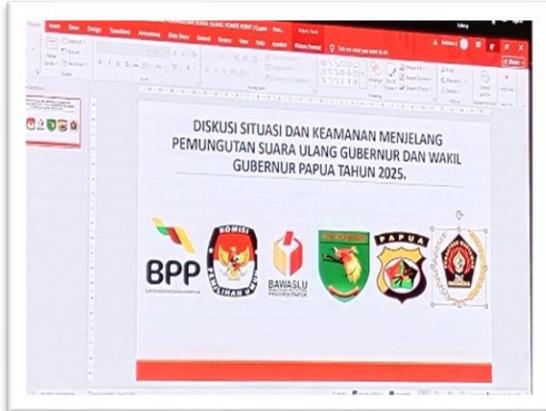


**III. Papua Produktif**

No	Kegiatan Strategis	Waktu	Tujuan	Hasil	Gambar
1	Diskusi Panel Peningkatan Ekonomi Jemaat Melalui Kemitraan Klasis Gki Keerom Dan 37 Jemaat.	09 Juli 2025	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mengetahui Data Jumlah KK dan Aset milik Jemaat</li><li>- Mendapatkan data potensi yang dimiliki oleh Jemaat</li><li>- Kegiatan Ekonomi yang sudah dilakukan</li><li>- Mendengar saran/masukan tentang kendala dan hambatan yang dihadapi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Peningkatan ekonomi jemaat melalui kemitraan Klasis GKI Keerom dengan PT. JAMKRIDA.</li><li>- Kerjasama gereja dengan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Keerom dalam pelatihan wirausaha dan pemasaran digital.</li><li>- Penyediaan dana bantuan UMKM oleh DISPERINDAGKOP-UKM Kabupaten Keerom.</li><li>- Penyusunan draf pemberdayaan ekonomi berbasis adat oleh BP30KP dan Pokja Papua Produktif, bekerjasama dengan PT Freeport dan lembaga donor.</li><li>- Koperasi jemaat mendata anggota produktif dan mengembangkan usaha rumahan seperti AMDK, kue, catering, tenda, dan ayam petelur atas inisiatif Ibu Anike Fonataba (SPSI).</li></ul>	 



**IV. Papua Polhukam**

No	Kegiatan Strategis	Waktu	Tujuan	Hasil	Gambar
	Diskusi situasi keamanan menjelang PSU Gubernur dan wakil Wakil Gubernur Papua Tahun 2025	9 Juli 2025	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memperoleh gambaran situasi keamanan terkini di wilayah Papua, khususnya daerah yang akan melaksanakan PSU, melalui informasi langsung dari aparat keamanan, pemerintah daerah, KPU, Bawaslu, tokoh adat, dan tokoh masyarakat.</li><li>2. Mengidentifikasi potensi kerawanan yang dapat mengganggu pelaksanaan PSU, seperti konflik horizontal, mobilisasi massa, provokasi politik, ataupun hambatan logistik.</li><li>3. Membangun sinergi dan koordinasi antar pemangku kepentingan (TNI, Polri, KPU, Bawaslu, pemerintah daerah, tokoh adat/agama) untuk menjamin keamanan dan kelancaran PSU.</li><li>4. Menetapkan langkah-langkah preventif dan respons cepat terhadap potensi gangguan keamanan.</li><li>5. Memberikan masukan strategis kepada BP3OKP untuk pengambilan kebijakan yang tepat dalam mendukung stabilitas keamanan sebelum, saat, dan setelah PSU.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peta situasi keamanan terkini yang jelas dan terperinci, termasuk titik-titik rawan yang perlu mendapat pengamanan ekstra.</li><li>2. Kesepahaman bersama antar seluruh pihak terkait tentang pentingnya menjaga keamanan, ketertiban, dan netralitas menjelang PSU.</li><li>3. Rencana pengamanan terpadu yang disepakati bersama, mencakup pembagian peran, jalur komunikasi, dan mekanisme koordinasi lapangan.</li><li>4. Komitmen tertulis atau lisan dari seluruh pihak untuk menghindari tindakan provokatif dan mematuhi aturan hukum.</li><li>5. Rekomendasi kebijakan yang dapat langsung diimplementasikan oleh BP3OKP dan aparat keamanan.</li></ol>	  



2	<p>Monitoring Persiapan Pelaksanaan PSU Gubernur dan Wakil gubernur Provinsi Papua Tahun 2025 di kabupaten Jayapura, Bersama KPU, Bawaslu, Polres dan DPRK kabupaten Jayapura, Sekaligus menyaksikan secara langsung Proses pendistribusian Logistik kotak dan surat suara di Gudang logistik KPU kab Jayapura.</p>	30 - 31 Juli 2025	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menilai tingkat kesiapan penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, aparat keamanan, dan stakeholder terkait) dalam menyelenggarakan PSU.</li><li>2. Mengidentifikasi potensi kerawanan atau hambatan yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan PSU.</li><li>3. Memastikan distribusi logistik pemilu (surat suara, kotak suara, dan alat kelengkapan lainnya) berjalan tepat waktu dan sesuai prosedur.</li><li>4. Mendorong sinergi dan koordinasi lintas sektor, termasuk pemerintah daerah, TNI/Polri, dan tokoh masyarakat dalam mendukung kelancaran PSU.</li><li>5. Meningkatkan partisipasi masyarakat, termasuk edukasi kepada pemilih tentang hak pilih dan teknis pelaksanaan PSU.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memastikan pelaksanaan PSU berjalan sesuai asas pemilu: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL).</li><li>2. Memantau kinerja penyelenggara pemilu di TPS, termasuk pelaksanaan prosedur teknis, penggunaan alat bantu, dan pelayanan kepada pemilih.</li><li>3. Mengawasi potensi pelanggaran, intimidasi, dan kecurangan, serta memastikan keamanan dan ketertiban di seluruh lokasi TPS.</li><li>4. Menilai respons cepat terhadap masalah di lapangan, seperti pemilih tidak terdaftar, logistik kurang, atau gangguan keamanan.</li></ol>	<p>KPU KAB JAYAPURA</p>  <p>BAWASLU KAB JAYAPURA</p> 
---	---	-------------------	--	---	--



**POLRES JAYAPURA**



**ANGGOTA DPRK KAB JAYAPURA**



**GUDANG LOGISTIK KPU KAB JAYAPURA**





## **REKOMENDASI**

Berdasarkan Kegiatan Strategis yang dilakukan, anggota dan Kelompok kerja (pokja) memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

### **1. Anggota Badan**

#### **A. Koordinasi Sektor Pendidikan**

BP3OKP mengarahkan Pemerintah Daerah dan K/L untuk perkuat sinergitas dalam menjalankan RIPPP & RAPP

#### **B. Koordinasi Lanjutan Kejaksaaan Tinggi**

BP3OKP akan memprakarsai Pertemuan lanjutan untuk membahas langkah strategis yang bisa di ambil dalam mengawal percepatan pembangunan di Papua

### **2. Kelompok Kerja (Pokja)**

#### **A. Papua Cerdas**

##### **1. Arahan Strategis : Penguatan Regulasi**

Dalam Diskusi Panel ditemukan bahwa Perda belum mengakomodasi pendidikan secara baik, oleh karena itu diperlukan perda agar bisa menjadi dasar dalam menjalankan pendidikan di Papua yang lebih inklusif

##### **2. Menjalini Koordinasi antara Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga, dan BP3OKP**

BP3OKP melalui Pokja Papua Cerdas memantau pendidikan melalui Pemerintah Daerah dan Kementerian Lembaga sebagai fungsi SHEK

#### **B. Papua Sehat**

##### **➤ RSUP Kemenkes Jayapura**

1. Kesiapan perekrutan kuota afirmasi khusus Papua di 6 prov ada 400 yang akan dilaksanakan bertahap mulai bulan Agustus sampai dengan peresmian Rumah Sakit .
2. Penunjang pelayanan rujukan RSUP membutuhkan ambulans helikopter 1 unit.

##### **➤ Poltekkes kemenkes jayapura**

1. Pengangkatan honorer dosen OAP yang sampai saat ini belum diangkat mereka sudah melaksanakan tugas 5-6 tahun di poltekkes masih berstatus honorer, dalam hal ini pokja papua sehat mengusulkan ada kuota khusus pengangkatan honorer poltekkes Kemenkes Jayapura (daftar nama honorer terlampir).
2. Peningkatan infrastruktur Gedung pembelajaran mahasiswa di poltekkes Kemenkes Jayapura .
3. Subsidi dana otsus unntuk membantu mahasiswa OAP yang tidak mampu membayar SPP.
4. Program pembukaan kelas khusus dikabupaten kota dengan menggunakan dana otsus dalam rangka pemenuhan tenaga para medis di kab-kota .

##### **➤ Smakes ( D4 analis)**

1. Membutuhkan subsidi dana otsus untuk operasional Pendidikan d4 analis ( proposal terlampir).
2. Peningkatan fasilitas Pendidikan.

##### **➤ Universitas cenderawasih (FK uncen)**

1. Subsidi dana otsus untuk membantu mahasiswa OAP yang tidak mampu membayar SPP dan administrasi perkuliahan lainnya.
2. Peningkatan sarana Pendidikan ruang belajar (pembangunan kampus FK Uncen).
3. Membutuhkan kebijakan khusus dari kemendikti untuk perekrutan mahasiswa kedokteran OAP.
4. Program pembukaan kelas khusus dikabupaten kota dengan menggunakan dana otsus dalam rangka pemenuhan tenaga medis ( dr umum) di kab-kota.



➤ **Lab kesmas kemenkes tir 4 wil papua**

1. Pembangunan lab kesmas tingkat 3 dan 4 di 5 prov pemekaran wilayah Papua sumber anggaran kemenkes .
2. Pembangunan lab kesmas tingkat 2 di seluruh kabupaten kota wilayah Papua sumber anggaran kemenkes .
3. Pembangunan / pengisian alat di lab kesmas tingkat 1 (puskesmas) guna mendukung program PKG (pemeriksaan kesehatan gratis ) bagi warga negara Indonesia yang berulang tahun oleh Bapak presiden Prabowo sebagai program unggulan diseluruh Indonesia.
4. Mengusulkan pengganti kepala lab kesmas wil 4 yang saat ini ditarik menjadi direktur keuangan rsp kemenkes jayapura yang menggantikan ibu kasubag administrasi umum lab kesmas Jayapura **Ibu Angugrah M. Juliana, SKM, M.Kes** (provil CV terlampir).

➤ **Karantina kemenkes wil 1 papua**

1. Untuk kapal kapal perintis yang melayani kampung dan pulau terluar di provinsi Papua sampai saat ini belum ada petugas medis dan para medis yang bertugas di atas kapal, sedangkan fasilitas klinik dan kamar dokter sudah tersedia diatas kapal untuk itu diharapkan pokja Papua Sehat BPP merekomendasikan kepada pelni untuk segera mempersiapkan tenaga medis dan para medis yang bekerja diatas kapal perintis yang saat ini sedang beroperasi di provinsi Papua.

➤ **BPJS**

1. BP3OKP Pokja Papua Sehat melakukan fungsi SHEK di provinsi dan kab kota dalam hal pengawasan penyetoran iuran bpjs 2% dari provinsi dan 40% dari kab kota yang sering terlambat disetor sedangkan bpjs / jkn diwajibkan menyetor claim rumah sakit dan puskesmas paling lambta tanggal 15 setiap bulan kalau lewat dari tanggal 15 maka BPJS denda 1%.

➤ **BKKBN**

1. Membutuhkan subsidi dana otsus dalam rangka pembayaran honor kader yang terlibat dalam pendampingan pengantaran MBG bagi bumil, busui dan bayi balita ke rumah-rumah, karena jasa transportasi yang disiapkan oleh badan gizi adalah 1 porsi/1k sedangkan tidak sesuai dengan ongkos transportasi di wilayah papua.
2. Pemisahan KB dari badan pemberdayaan perempuan untuk mendapatkan pelayanan maksimal dengan menggunakan anggaran dari APBN dikarenakan BKKBN pada saat ini sudah memiliki kementrian tersendiri ( kementrian kependudukan pembangunan keluarga) dengan nama OPD di kabupaten kota yaitu kantor pengendalian penduduk dan KB yang saat ini sudah terbentuk dikabupaten Jayapura dengan dasar PP no. 18 tahun 2016 dan UU no.23 tahun 2014.

**C. Papua Produktif**

- Kemitraan Strategis antara Gereja dengan Pemerintah Kabupaten Keerom, PT JAMKRIDA, SPSI, PT Freeport dan Lembaga Donatur lainnya.
- BP3OKP Papua melalui Pokja Papua Produktif akan Menyusun Draff Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Adat, Wilayah dan Klen/Marga.
- Invertasi Jemaat perlu mendapat dukungan dari Pemilik Hak Ulayat
- Perlu didirikan Koperasi Jemaat dan ada pendampingan terhadap Lembaga-lembaga yang bergerak dalam Pasar.
- Mendukung program Pemerintah Kabupaten Keerom dalam rangka PSR dan Penanaman Jagung sebagai Proyek Strategi Nasional Food Estate.



#### D. Papua Polhukam

- **Perkuat Koordinasi Lintas Sektor dan Lembaga**  
Tingkatkan sinergi antara TNI, Polri, BIN, KPU, Bawaslu, DPRK, pemerintah daerah, dan BP3OKP di daerah melalui jalur komunikasi cepat seperti hotline atau grup WA resmi. Koordinasi ini penting untukantisipasi hambatan teknis, keamanan, serta pemantauan situasi secara real time.
- **Libatkan Tokoh Adat dan Agama Sebagai Mediator**  
Libatkan tokoh adat dan agama sebagai mediator dan penyejuk di masyarakat guna mencegah gesekan dan menjaga kondusivitas selama proses PSU.
- **Penguatan Kesiapan Logistik dan Distribusi Aman**  
Pastikan kelengkapan, kualitas, dan pengamanan logistik secara menyeluruh dengan sistem pengepakan berlapis serta penggunaan segel resmi. Susun rute distribusi yang efisien dengan pertimbangan kondisi geografis dan potensi gangguan keamanan, serta pastikan pengawalan personel keamanan hingga logistik tiba di TPS.
- **Pengawasan Ketat dan Dokumentasi Lengkap**  
Tingkatkan pengawasan oleh Bawaslu dan DPRK dalam proses distribusi logistik untuk mencegah penyimpangan. Semua tahapan didokumentasikan secara lengkap sebagai bahan evaluasi. Tim monitoring harus menyusun laporan harian dan laporan akhir dengan rekomendasi perbaikan.
- **Pengamanan Maksimal dan Antisipasi Gangguan**  
Polri menyiapkan pengamanan terbuka dan tertutup mulai dari gudang hingga TPS. Siapkan pula rencana cadangan jika terjadi gangguan keamanan atau cuaca buruk agar distribusi logistik tidak terhambat.
- **Dukungan Logistik dan Komunikasi di Daerah Rawan**  
Sediakan fasilitas transportasi darat, laut, dan udara yang mendukung distribusi serta komunikasi yang lancar bagi aparat keamanan untuk mempercepat respon di daerah rawan.
- **Pendekatan Humanis dan Penyampaian Pesan Resmi**  
Terapkan pendekatan persuasif dan humanis dalam penanganan konflik dengan ketegasan hukum tetap dijaga. Pemerintah pusat perlu menyampaikan pesan resmi kepada masyarakat Papua untuk menjaga persatuan, menghormati proses demokrasi, dan menghindari kekerasan.
- **Aktifkan Posko Pemantauan Keamanan Terpadu**  
Posko yang melibatkan semua pihak terkait harus aktif beroperasi sejak pra-PSU, saat PSU, hingga pasca-PSU untuk memastikan pemantauan keamanan menyeluruh dan respons cepat terhadap setiap situasi.
- **Transparansi dan Publikasi Informasi**  
Sampaikan informasi resmi terkait jadwal distribusi dan kesiapan PSU kepada masyarakat melalui media lokal, papan pengumuman, dan kanal resmi agar menghindari isu dan disinformasi.



## **1. Kesimpulan**

BP3OKP Provinsi Papua telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis yang terfokus pada empat bidang utama, yakni pendidikan, kesehatan, produktivitas ekonomi, dan stabilitas keamanan. Melalui kolaborasi anggota badan dan kelompok kerja, upaya percepatan pembangunan berjalan sinergis antara pemerintah daerah, kementerian/lembaga, serta pemangku kepentingan lainnya. Langkah-langkah nyata seperti penguatan regulasi, peningkatan pelayanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi berbasis adat, dan pengamanan pemilu menunjukkan komitmen yang kuat untuk mempercepat peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua.

## **2. Penutup**

Demi keberhasilan pembangunan Otonomi Khusus di Papua, perlu adanya penguatan koordinasi lintas sektor, penambahan sumber daya manusia dan fasilitas, serta pelibatan tokoh adat dan agama dalam menjaga stabilitas keamanan. Dengan menerapkan rekomendasi secara konsisten dan sinergis, diharapkan pembangunan di Provinsi Papua dapat berlangsung efektif dan berkelanjutan, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, dan menjaga harmonisasi sosial politik di wilayah ini. BP3OKP bersama seluruh pemangku kepentingan diharapkan terus memperkuat komitmen dan kerja sama demi kemajuan Papua